

Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman dan Industri Di Kawasan Kabupaten Bekasi

Deris Desmawan¹, Amelia Nuraisah², Anida Mumtaz³, M. Farid Fadhilah⁴, Faisa Syahda Aufa⁵, Lely Malihati⁶

Department of Economic Development, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 26 November 2024

Revised: 13 Desember 2024

Accepted: 15 Desember 2024

Keywords:

Pengalihan fungsi lahan

Lahan Pemukiman

Kawasan Industri

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri di Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Bengkulu yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Alih fungsi lahan ini berdampak pada penurunan produksi pangan lokal, peningkatan ketergantungan impor, serta permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan penurunan kualitas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, diskusi kelompok, studi kasus, analisis dokumen, dan grounded theory. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi tentang perlindungan lahan pertanian dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, alih fungsi lahan juga memicu permasalahan sosial, seperti urbanisasi yang tidak terkendali dan hilangnya budaya lokal, serta dapat memperparah ketimpangan sosial ekonomi.

This study analyzes the impact of the conversion of agricultural land into residential and industrial land in Bekasi Regency, which is triggered by rapid population growth and urbanization. This land conversion results in a decrease in local food production, an increase in dependence on imports, and environmental problems such as pollution and deterioration of soil quality. The methods used in this study include interviews, group discussions, case studies, document analysis, and grounded theory. The results of the study show the need for regulations on agricultural land protection and the application of sustainable agricultural technology to maintain a balance between economic development and environmental conservation. In addition, land conversion also triggers social problems, such as uncontrolled urbanization and the loss of local culture, and can exacerbate socio-economic inequality.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Deris Desmawan

Department of Economic Development, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Jl. Raya Palka No.Km 3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42111

Email: deridesmawan@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pengalihan lahan dapat dikaitkan dengan perubahan seluruh fungsi lahan atau sebagian lahan disuatu kawasan daerah yang semula menjadi kawasan pertanian hingga kawasan permukiman dan kawasan industri yang membawa dampak terhadap lahan pertanian di kawasan suatu daerah. Lahan pertanian sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi suatu wilayah. Sektor pertanian terus menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan pangan negara. Namun, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya seiring dengan pertumbuhan pesat industri dan permukiman. Di daerah-daerah yang memiliki akses strategis dan dekat dengan pusat-pusat ekonomi, seperti Kabupaten Bekasi, proses konversi lahan pertanian ini semakin marak.

Berkurangnya lahan pertanian mengancam ketergantungan pada impor pangan, sementara perubahan fungsi lahan juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kondisi lingkungan. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mendukung pertanian yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di kabupaten bekasi perubahan penggunaan lahan memerlukan perhatian dan pengelolaan yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian sumber daya alam.

Konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mengurangi ruang terbuka hijau, dan berdampak pada kualitas udara, tanah, dan air. Selain itu, karena lahan pertanian yang berkurang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, perubahan ini juga dapat mengganggu keberlanjutan produksi pangan lokal. Di Kabupaten Bekasi, yang memiliki banyak kawasan industri seperti Cikarang dan sekitarnya, ada peningkatan tekanan terhadap penggunaan lahan. Hal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti banjir, polusi, dan penurunan kualitas tanah menjadi lebih buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang efek lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran fungsi lahan pertanian ke lahan permukiman dan industri di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi, yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap penggunaan lahan sebagai akibat dari peningkatan urbanisasi dan industrialisasi. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari populasi, pembangunan permukiman dan industri semakin mengganggu lahan pertanian yang dulunya subur dan menjadi sumber utama pangan. Pengalihan fungsi lahan ini memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan.

Selama beberapa dekade terakhir, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi, yang terletak di perbatasan Jakarta, telah mengalami pergeseran yang signifikan. Jumlah lahan pertanian di daerah ini semakin berkurang seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan industri dan permukiman. Fenomena ini disebabkan oleh peningkatan urbanisasi dan kebutuhan akan ruang hunian dan fasilitas industri yang mendukung ekonomi ibu kota dan daerah. Pengalihan fungsi lahan ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi.

Meskipun sektor industri memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, pertumbuhannya juga memiliki efek negatif, terutama dalam hal penggunaan lahan. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri sering mengurangi ruang terbuka hijau dan lahan pertanian produktif yang sangat penting untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, polusi udara dan air yang dihasilkan oleh aktivitas industri juga memengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, pergeseran fungsi lahan yang cepat ini meningkatkan tekanan pada sumber daya alam seperti pengelolaan limbah dan pasokan air. Dibutuhkan perencanaan pembangunan industri yang lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya karena pertumbuhan industri yang pesat di Kabupaten Bekasi menimbulkan tantangan besar dalam mengelola keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kabupaten Bekasi, yang terletak dekat Jakarta, telah mengalami transformasi pesat dengan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri. Proses urbanisasi ini mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, yang sebelumnya menjadi sumber utama pangan, serta menimbulkan dampak negatif pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi kualitas lingkungan, penurunan kesuburan tanah, berkurangnya keragaman hayati, serta peningkatan polusi dan risiko bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak lingkungan dari perubahan tersebut dan mencari solusi untuk memitigasi dampak negatif guna menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Diharapkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang efek ini, akan ditemukan cara untuk mengelola penggunaan lahan secara lebih berkelanjutan yang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tetapi juga akan menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pemahaman penelitian yang berdasarkan pandangan yang dialami secara langsung untuk mendapatkan informasi dan persepsi kita terhadap fenomena tersebut yang hasilnya deskriptif, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian tersebut.

PEMBAHASAN

Kondisi lahan pertanian menjadi lahan permukiman

Semakin berkembangnya zaman pertumbuhan penduduk pun semakin banyak, sehingga membutuhkan tempat tinggal. Maka akan terjadi pengalihan lahan agar dapat memenuhi semua kebutuhan penduduk untuk mempunyai tempat tinggal. Daerah yang sudah mengalami pengalihan lahan adalah Kabupaten Bekasi, karena bisa dilihat bahwa Kabupaten Bekasi adalah sebuah kawasan industri yang mayoritas penduduk merupakan pendatang yang mendapatkan pekerjaan di daerah Kabupaten Bekasi. Semakin bertambahnya pendatang dan juga pertumbuhan penduduk semakin banyak maka akan terjadi pengalihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman untuk dijadikan bangunan tempat tinggal. Alasan mengapa terjadi pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Bekasi karena UMR disana termasuk tinggi dan juga biaya hidup termasuk kategori terjangkau. Dan Contoh terjadi pengalihan lahan adalah terjadi di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, bahwa beberapa sawah yang dipunyai penduduk disana sudah dibeli oleh Perusahaan pengelola kawasan industri untuk membangun kawasan perumahan bagi pekerja untuk tambahan fasilitas bagi para pekerja di kawasan industri, misalnya Perusahaan yang ada di Kawasan Industri Jababeka dan MM2100.

Dampak pengalihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman adalah berkurangnya luas lahan pertanian sehingga lahan pertanian yang subur dialihkan pembangunan perumahan, pusat pembelajaran dan juga infrastruktur lainnya, yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal seperti beras dan berdampak pada ketahanan pangan.

Terjadi penurunan produksi pangan lokal, berkurangnya lahan pertanian, maka jumlah hasil pangan juga akan berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan pangan yang dapat diakses oleh penduduk di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, dan sayuran. Walaupun Kabupaten Bekasi merupakan daerah daratan rendah yang tidak di kelilingi oleh iklim yang dingin sehingga beberapa sayuran yang tumbuh di daerah pegunungan tak mungkin tumbuh di Kabupaten Bekasi sehingga membutuhkan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun tidak semua kebutuhan pangan harus diambil dari daerah lain masih ada beberapa kebutuhan pangan yang bisa dihasilkan di Kabupaten Bekasi salah satunya beras, jika terjadi pengalihan lahan secara terus menerus maka akan terjadi pengurangan dan ketergantungan beras terhadap daerah lain secara terus menerus.

Dampak pada ekonomi dan sosial adalah berkurangnya mata pencaharian petani karena para petani bergantung pada lahan pertanian, maka jika terjadi pengalihan akan terjadi kehilangan mata pencaharian sebagai petani, maka dapat memicu masalah sosial-ekonomi seperti pengangguran dan juga kemiskinan. Jika pengalihan lahan terus terjadi tanpa memikirkan solusi untuk keseimbangan, seiring berjalannya waktu Kabupaten Bekasi akan kehilangan lahan pertanian. Sehingga perlu dibuat solusi agar hal tersebut tidak terjadi, solusinya adalah dibuat peraturan perlindungan lahan pertanian dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dengan undang-undang. Membuat konsep pertanian berkelanjutan dan pertanian yang dapat dilakukan di daerah minim lahan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk menghasilkan kebutuhan pangan tanpa memerlukan lahan yang luas.

Faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian berubah menjadi lahan industri

Menurut Andi Sansono, pengertian hak fungsi lahan mengacu pada proses perubahan penggunaan suatu tanah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, dan hak fungsi tanah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang berangsur-angsur meningkat dan pembangunan yang terus-menerus mengalami percepatan menuju non-pertanian. Meningkatnya permintaan tanah untuk kegiatan konstruksi disebabkan oleh struktur pemilik dan penggunaan tanah yang terus menerus. Perkembangan industri yang cukup pesat bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih banyak. Perubahan spesifik dalam peralihan dari pertanian ke lahan non-pertanian semakin diakui sebagai ahli fungsi (confersi) lahan, kian waktu kian semakin meningkat, dan fenomena ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari. Jika dampak yang terjadi saat ini tidak ditanggapi dengan serius, maka fungsi ahli lahan pertanian yang tidak dapat dikendalikan akan mampu menurunkan kapasitas penyediannya.

Tanah merupakan komponen strategis yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Sekolah tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami penurunan, dan jumlah lahan pertanian dipengaruhi oleh faktor penduduk dan aktivitas. Konstruksi Hal ini dapat membantu mengatasi meningkatnya permintaan lahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada munculnya penggunaan lahan non-pertanian, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, pembangunan perumahan, dan penggunaan lainnya. Untuk memenuhi permintaan yang ada. Sebagai Ahli fungsi lahan yang terpadu tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan masyarakat. Ahli fungsi lahan dapat merupakan perubahan fungsi Sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (terpisah yang ditut) sebagai fungsi lain yang menghambat lingkungan hidup dan potensi lahan itu sendiri (Yunus, 2023).

Faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang semakin memicu terjadinya konversi lahan pertanian. Secara internal, tekanan ekonomi, kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta keterbatasan luas lahan sering kali mendorong petani untuk menjual lahan mereka. Selain itu, faktor eksternal, seperti pengaruh dari warga sekitar yang telah lebih dulu menjual lahannya, dorongan dari pihak swasta atau pengembang perumahan yang menawarkan harga jual tinggi, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, juga turut mempercepat proses ini. Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sering kali mempermudah perubahan fungsi lahan, semakin memperparah kondisi tersebut. Faktor lain yang turut memengaruhi alih fungsi lahan adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang menciptakan kebutuhan tambahan untuk perumahan, pusat perbelanjaan, infrastruktur, dan tempat usaha lainnya. Selain itu, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang sering kali memaksa lahan pertanian di sekitar kota untuk dikonversi menjadi penggunaan lain. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah rumah tangga juga menjadi pendorong signifikan dalam proses ini, yang pada akhirnya mengurangi luas lahan pertanian produktif

Dampak yang ditimbulkan karena perubahan lahan pertanian menjadi lahan permukiman

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman membawa dampak signifikan terhadap produksi pangan di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data dari *Yudhistira (2013)*, dalam sepuluh tahun terakhir, konversi lahan ini menyebabkan kehilangan produksi gabah sebesar 28.091,25 ton, yang setara dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 73,7 miliar. Dampak langsung juga dirasakan oleh petani, terutama berupa penurunan pendapatan. Rata-rata pendapatan petani berkurang hingga Rp 3.331.548 setelah lahan pertanian mereka dialihkan. Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga secara langsung memengaruhi kesejahteraan para petani (*Yudhistira, 2013*).

Dari perspektif ketahanan pangan, perubahan fungsi lahan ini menurunkan kapasitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Bekasi mengalami defisit produksi beras sebesar 12.052 ton. Meskipun konsumsi beras per kapita diproyeksikan turun 1,5% per tahun, defisit tetap terjadi pada 2018 dengan jumlah 1.440 ton (*Yudhistira, 2013*)

Proses alih fungsi lahan biasanya dimulai dengan pengalihan kepemilikan dari petani ke pihak lain, seperti pemborong atau investor. Lahan tersebut kemudian dikonversi menjadi kawasan permukiman atau industri. Laju alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi dalam periode 2001-2011 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata penurunan sebesar -0,43 persen per tahun, dan puncaknya mencapai -1,55 persen pada 2010. Faktor yang mendorong alih fungsi lahan dapat dilihat dari dua aspek, yakni makro dan mikro. Secara makro, pertumbuhan PDRB dan populasi menjadi pendorong utama. Sedangkan secara mikro, keputusan petani untuk menjual lahannya dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga dan proporsi pendapatan dari usaha tani dibandingkan total pendapatan mereka (Aris et al., 2023)

Dilihat dari aspek kelembagaan, posisi strategis Kabupaten Bekasi sebagai penyangga Jabodetabek turut mempercepat laju alih fungsi lahan. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung pembangunan permukiman dan industri di kawasan tersebut memberikan legitimasi bagi perubahan lahan yang masif.

Dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan ini adalah ancaman serius terhadap keberlanjutan ketahanan pangan wilayah. Berkurangnya lahan produktif tidak hanya mempengaruhi hasil produksi pangan, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Kondisi ini diperburuk oleh status kepemilikan lahan, yang menjadi faktor penting dalam keputusan petani untuk melepas lahan mereka.

Dampak yang ditimbulkan ketika lahan pertanian menjadi lahan industri

Nasoetion dan Winoto (Sulistiyawati, 2014:10-11) aspek yang berkaitan dengan dampak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian itu berkaitan dengan perubahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, dan prioritas pembangunan pertanian nasional dan regional akan dipengaruhi oleh arah perubahan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Widjanarko (Sulistiyawati, 2014:11) Dampak alih fungsi lahan dapat langsung atau tidak langsung. Alih fungsi lahan menyebabkan kehilangan lahan pertanian yang subur, kurangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan lanskap alam, dan masalah lingkungan. Kemudian ada dampak tidak langsung, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Alih fungsi lahan pertanian memengaruhi lingkungan. Keseimbangan ekosistem lahan pertanian akan terganggu jika lahan pertanian diubah menjadi lahan non-pertanian.

Dampak yang dirasakan oleh para petani

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian sangat beragam dan signifikan, terutama bagi petani dan ketahanan pangan secara umum. Para petani sering kali kehilangan mata pencaharian mereka, mengalami penurunan pendapatan, dan bahkan kesulitan untuk kembali bertani karena berkurangnya luas lahan yang tersedia. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan pangan, terutama produksi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Gangguan pada produksi pangan ini dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Selain dampak ekonomi dan sosial, alih fungsi lahan juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Penurunan luas lahan yang mampu menyerap air meningkatkan aliran air permukaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan banjir. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat hilangnya lahan hijau memengaruhi stabilitas ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, petani yang lahannya dikonversi bahkan mengalami penurunan ketahanan pangan rumah tangga mereka dan terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara keseluruhan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman tidak hanya berdampak pada individu petani, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih bijak dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan ini, agar dapat melindungi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Dampak yang akan timbul dalam jangka panjang jika pengalihan lahan pertanian akan terus dilakukan

Pengalihan lahan pertanian ke non-pertanian secara berkelanjutan membawa dampak serius jangka panjang. *Setiawan dan Sofynia (2022)* mencatat bahwa perubahan ini di wilayah pinggiran kota memicu perubahan sosial yang signifikan, termasuk melemahnya budaya gotong royong serta berkembangnya pola hidup konsumtif di masyarakat. Dari sudut pandang ketahanan pangan, *Irawan (2018)* menegaskan bahwa alih fungsi lahan produktif berisiko mengurangi ketersediaan pangan nasional. Kondisi ini berpotensi memperbesar ketergantungan pada impor pangan, yang dapat mengancam kedaulatan pangan di masa depan.

Dampak ekologis juga patut menjadi perhatian. *Widayati dkk. (2020)* mengungkapkan bahwa hilangnya lahan pertanian mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama dalam hal berkurangnya daerah resapan air. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya risiko banjir dan krisis air tanah, serta perubahan iklim mikro yang memengaruhi suhu lokal. Dari aspek ekonomi, *Sulistyaningsih (2019)* mengamati bahwa konversi lahan menyebabkan banyak petani kehilangan mata pencaharian. Kurangnya keterampilan baru membuat mereka beralih ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil, sehingga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi.

Transformasi sosial budaya juga menjadi dampak yang signifikan. *Kustiawan dan Anwar (2021)* menyoroti bahwa hilangnya lahan pertanian sering diiringi dengan terkikisnya kearifan lokal dan tradisi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat agraris. Alih fungsi lahan juga memicu perubahan demografis yang serius. *Handayani dan Nurjani (2019)* menyatakan bahwa konversi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri mendorong urbanisasi yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan pada infrastruktur perkotaan meningkat, dan berbagai masalah sosial mulai bermunculan.

Dampak kesehatan masyarakat juga tidak luput dari perhatian. *Wibowo dan Santosa (2021)* mengungkapkan bahwa berkurangnya lahan pertanian organik meningkatkan ketergantungan pada pangan berbahan kimia, yang dapat berimplikasi negatif terhadap kesehatan masyarakat.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi tentang perlindungan lahan pertanian dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, alih fungsi lahan juga memicu permasalahan sosial, seperti urbanisasi yang tidak terkendali dan hilangnya budaya lokal, serta dapat memperparah ketimpangan sosial ekonomi.

REFERENSI

- Aris, R. Y., Nurmi, N., & Azis, M. A. (2023). EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.) DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO. In *Jurnal Lahan Pertanian Tropis (JLPT)* (Vol. 2, Issue 2, pp. 128–136). Universitas Negeri Gorontalo. <https://doi.org/10.56722/jlpt.v2i2.23803>
- Sugiharto, F., & Agustin, N. (2023). Pengaruh Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.35472/jppk.v3i2.950>
- Simatupang, L., & Rizki Setiawan. (2022). Perubahan Sosial : Alih Fungsi Lahan pada Masyarakat Bekasi. *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.21009/saskara.021.03>
- Sari, R. W. S. W. S., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>
- Santoso, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. *Pendidikan Geografi*, 03(03), 178–184.
- Putra, E. D., & Ismail, M., A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Jember. *Agritech*, XIX(2), 99–109.

- Purwaningsih, Y., Istiqomah, N., & Sutomo, S. (2015). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 98–107. <https://doi.org/10.18196/agr.1213>
- Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno. (2020). Pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian. *Mediagro*, 16(2), 26–36.
- Pondaag, C. . ., Pakasi, C. B. D., & Kumaat, R. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.14.2.2018.20575>
- Iskandar, E., & Haryadi, R. (2021). Persepsi Petani Desa Sukarahayu Kabupaten Bekasi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman. *Neo Politea*, 2(2), 32–49. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v2i2.453>
- Hidayat, M. B. (2019). *PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERMUKIMAN TERHADAP HASIL PRODUKSI PADI SAWAH BERBASIS SIG (Studi Kasus: Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Tahun 2005-2015)*. 1–95. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49685>
- Chrisnawati, L. S. (2023). PProblematika Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Ecolab*, 17(2), 95–104. <https://doi.org/10.59495/jklh.2023.17.2.95-104>
- Aryani, U., Sulistyarini, S., & Christanto, L. M. H. (2022). Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kecamatan Sengah Temila Tahun 2009-2019. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(7), 750. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i7.56639>
- Yudhistira, M. D. (2013). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara). *Skripsi*, 5.
- Yunus, A. (2023). Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1 Nomor 1, 277–288.